

HAM TKI Di Korea Banyak Dilanggar

PENDERITAAN pekerja migran di Korea asal Indonesia, Filipina dan Vietnam terungkap. Kondisi kehidupan yang sangat buruk, pelanggaran kemanusiaan yang terus terjadi, membuat mereka rentan jadi korban perdagangan orang.

Hal itu terungkap dalam Laporan Penelitian Tied at Sea, yang dirilis Sin Young Chung, Advocates for Public Interest Law (APIL). Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menjelaskan, dalam laporan itu diungkap, banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami para pekerja migran.

"Hidup yang buruk, pelanggaran kemanusiaan, kejahatan dan perdagangan orang, terungkap dalam laporan penelitian," tuturnya.

Laporan itu menyebutkan, banyaknya pelanggaran HAM karena ketidakjelasan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Banyak perusahaan penyedia jasa di industri perikanan, belum tahu standar layak untuk pekerjanya.

"Parahnya, belum ada satu pun mekanisme perlindungan pekerja industri perikanan di tingkat regional. Sehingga mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia dan kejahatan internasional," ujar Marthin.

Beberapa masalah yang disebutkan dalam laporan tersebut seperti, rentan manipulasi sebelum proses perekrutan dimulai. Karena tingkat pendidikan mereka yang um-

umnya rendah, pengangguran dan sumber daya finansial yang terbatas. "Penyebabnya karena kemiskinan struktural," terangnya.

Kemudian, keterlibatan banyak lembaga perantara perekrutan perantara selama proses rekrutmen yang menyulitkan pekerja. Juga ada biaya perekrutan tinggi. Termasuk uang jaminan, biasanya mendorong pekerja migran melakukan pinjaman. Bahkan sejak sebelum keberangkatan ke negara tujuan.

"Penyebab selanjutnya, kontrak kerja. Memaksa mereka bekerja dengan waktu panjang tanpa uang lembur memadai, dan upah yang sangat rendah. Serta mengharuskan mereka menyerahkan paspor sebagai jaminan selama kontrak," ungkap Marthin.

Belum lagi, kurangnya fasilitas pelatihan dan pendidikan secara ideal. Mulai dari hak-hak dasar pekerja, sosial dan budaya, keselamatan kerja, bahasa Korea dan keterampilan khusus industri perikanan.

Sedangkan jam kerja yang panjang mulai 12 jam per hari, 18-20 jam per hari. Bahkan mencapai 22 jam per hari jika dalam waktu sibuk. Ini menambah penindasan yang terjadi kepada para pekerja migran.

Mengenai upah, lanjut Marthin, tidak setara antara pekerja dan sangat rendah di bawah upah minimum dalam standar pekerja lintas negara. "Termasuk penentuan yang tidak adil. Serta tidak dibayarnya upah lembur," katanya. ■ JON